

RELEVANSI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI

Oding Junaedi

Faculty Of Law, Jayabaya University

Email : junaedi@gmail.com

Citation: Oding Junaedi. Relevansi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi. *Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara* 1.2.2024. 73-83

Submitted:17-08-2024 **Revised:**13-09-2024 **Accepted:**03-10-2024

Abstrak

Globalisasi membawa berbagai tantangan terhadap keberlanjutan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi tantangan globalisasi serta hambatan dalam implementasinya dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang berkaitan dengan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pancasila tetap relevan sebagai pedoman dalam menjaga identitas nasional, implementasinya menghadapi berbagai kendala. Tantangan utama yang dihadapi meliputi pengaruh budaya asing yang dapat menggeser nilai-nilai lokal, menurunnya pemahaman generasi muda terhadap ideologi bangsa, serta meningkatnya ketimpangan sosial dan ekonomi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan penguatan regulasi yang mengakomodasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan nasional, peningkatan pendidikan berbasis Pancasila, serta peran negara dalam mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi. Dengan langkah-langkah tersebut, Pancasila dapat terus menjadi landasan utama dalam membangun bangsa yang berdaulat dan berkeadilan di era global.

Kata Kunci : Pancasila, Globalisasi

Abstract

Globalization brings various challenges to the sustainability of Pancasila values in national and state life. This study aims to analyze the relevance of Pancasila values in facing the challenges of globalization and obstacles in its implementation using normative legal research methods. This study focuses on the study of laws and regulations and legal doctrines related to the implementation of Pancasila values in the national legal system. The results of the study indicate that although Pancasila remains relevant as a guideline in maintaining national identity, its implementation faces various obstacles. The main challenges faced include the influence of foreign cultures that can shift local values, the decline in the understanding of the younger generation towards the nation's ideology, and the increase in social and economic inequality. To overcome these challenges, it is necessary to strengthen regulations that accommodate Pancasila values in national policies, improve Pancasila-based education, and the role of the state in reducing socio-economic disparities. With these steps, Pancasila can continue to be the main foundation in building a sovereign and just nation in the global era.

Keywords: Pancasila, Globalization

A. PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan fenomena multidimensional yang membawa perubahan besar dan kompleks dalam berbagai aspek kehidupan, mencakup bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya.¹ Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, meningkatnya mobilitas manusia antarnegara, serta kebijakan perdagangan bebas menjadi faktor utama yang mempercepat arus globalisasi. Fenomena ini memberikan dampak yang beragam bagi negara-

¹ Yuni Arfina, "Tantangan Globalisasi Terhadap Keberagaman Budaya: Suatu Pendekatan Sosio-Politik," *Literacy Notes* 1, no. 2 (2023).

negara di dunia, termasuk Indonesia.² Di satu sisi, globalisasi membuka peluang besar dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi asing, inovasi teknologi, serta kemudahan akses terhadap informasi dan sumber daya. Namun, di sisi lain, globalisasi juga membawa berbagai tantangan, seperti semakin pudarnya identitas budaya nasional, meningkatnya kesenjangan sosial-ekonomi akibat ketimpangan distribusi kesejahteraan, serta ancaman terhadap eksistensi nilai-nilai kebangsaan yang telah lama menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.³

Dalam konteks Indonesia, tantangan globalisasi semakin kompleks karena beragamnya kondisi sosial dan budaya di dalam negeri. Liberalisasi ekonomi dan dominasi budaya asing sering kali mempengaruhi pola pikir masyarakat, yang mengarah pada perubahan gaya hidup yang semakin individualistik dan materialistik.⁴ Selain itu, perkembangan teknologi yang pesat turut mempermudah penyebaran informasi yang tidak selalu selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal, sehingga dapat memicu pergeseran norma sosial dan melemahkan rasa nasionalisme. Kondisi ini menuntut adanya upaya nyata dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap globalisasi dengan pelestarian nilai-nilai fundamental bangsa.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas nasional serta mempertahankan identitas kebangsaan. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar dalam sistem hukum dan ketatanegaraan, tetapi juga menjadi falsafah hidup yang mengarahkan masyarakat Indonesia dalam menghadapi dinamika perubahan zaman.⁵ Nilai-nilai Pancasila, yang mencakup Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan Sosial, memberikan landasan moral dan etika bagi masyarakat dalam berinteraksi, baik di tingkat nasional maupun global. Oleh karena itu, penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila menjadi kunci utama dalam menghadapi dampak negatif globalisasi tanpa harus menolak manfaat positif yang ditawarkannya.

Namun, dalam realisasinya, penerapan nilai-nilai Pancasila menghadapi berbagai hambatan yang cukup signifikan. Pengaruh budaya asing yang semakin dominan sering kali

² Paulus Rudolf Yuniarto, "Masalah Globalisasi di Indonesia: Antara Kepentingan, Kebijakan, dan Tantangan," *Jurnal Kajian Wilayah* 5, no. 1 (2016): 67-95.

³ Annisa Ahadiani, Menur Putria Duwy, dan Siti Nurhayati Wergiri, "Dinamika Kebijakan Internasional: Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi," *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen* 1, no. 4 (2024): 301-310.

⁴ Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2005).

⁵ Muhamad Hisyam dan Cahyo Pamungkas, eds., *Indonesia, Globalisasi, dan Global Village* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016).

menyebabkan pergeseran nilai di kalangan generasi muda, yang lebih mengadopsi gaya hidup hedonistik dan konsumtif dibandingkan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Selain itu, inkonsistensi dalam penerapan kebijakan berbasis Pancasila di berbagai sektor sering kali menimbulkan kesenjangan antara idealisme dan praktik di lapangan. Kurangnya pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai Pancasila juga menjadi tantangan tersendiri dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya menjaga dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang sistematis dan berkelanjutan dalam memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi. Pertama, diperlukan revitalisasi pendidikan karakter berbasis Pancasila sejak dini agar generasi muda memiliki pemahaman yang kuat terhadap identitas nasional dan tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Kedua, pemerintah harus memperkuat regulasi yang mendukung penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kebijakan publik, baik di sektor ekonomi, politik, maupun sosial. Ketiga, masyarakat perlu didorong untuk lebih aktif dalam mempertahankan budaya lokal serta mengembangkan kreativitas berbasis kearifan lokal agar tidak kalah bersaing di tingkat global. Keempat, pemanfaatan teknologi digital harus diarahkan untuk memperkuat penyebaran nilai-nilai Pancasila melalui media sosial, pendidikan daring, serta berbagai platform komunikasi lainnya.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam relevansi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi tantangan globalisasi, mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul dalam implementasinya, serta merumuskan solusi konkret agar nilai-nilai Pancasila tetap menjadi landasan yang kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis pada strategi yang komprehensif, diharapkan Pancasila tetap menjadi pedoman utama dalam menjaga harmoni sosial, memperkuat nasionalisme, serta memastikan bahwa Indonesia dapat berkembang di era globalisasi tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa yang berdaulat dan bermartabat.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan

digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Relevansi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tetap memiliki relevansi yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul akibat globalisasi. Sebagai falsafah dan ideologi bangsa, Pancasila memberikan landasan moral, sosial, dan politik yang kokoh dalam menyaring pengaruh global yang dapat mengancam kedaulatan budaya, identitas nasional, serta kesejahteraan masyarakat. Setiap sila dalam Pancasila memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap perkembangan global dengan pelestarian nilai-nilai fundamental bangsa Indonesia.

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan arus informasi yang cepat, perubahan sosial yang dinamis, serta persaingan ekonomi yang semakin ketat, implementasi nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting agar bangsa Indonesia tetap mampu mempertahankan jati dirinya. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan serta dalam kehidupan bermasyarakat, Indonesia dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa harus kehilangan karakter dan prinsip-prinsip dasar yang telah menjadi identitasnya.

Lebih dari sekadar menjadi dasar negara, Pancasila juga berfungsi sebagai filter dalam menghadapi pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma dan nilai bangsa. Ketika tantangan globalisasi menghadirkan berbagai persoalan seperti meningkatnya individualisme, ketimpangan sosial-ekonomi, serta melemahnya rasa persatuan dan nasionalisme, Pancasila menjadi alat yang efektif untuk mengatasi persoalan tersebut dengan menekankan pentingnya ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi yang berkeadilan, serta kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

Globalisasi mendorong sekularisasi dan materialisme yang mengutamakan rasionalitas serta kepentingan duniawi, sehingga ideologi baru yang terkadang bertentangan dengan nilai keagamaan semakin mudah masuk ke dalam masyarakat

Indonesia. Namun, sila pertama Pancasila menegaskan bahwa nilai ketuhanan harus tetap menjadi landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penguatan nilai-nilai keagamaan berperan sebagai benteng moralitas agar masyarakat tidak tergerus oleh budaya asing yang bertentangan dengan prinsip agama. Selain itu, nilai ketuhanan juga berkontribusi dalam menciptakan harmoni sosial di tengah keberagaman agama, terutama di era globalisasi yang sering kali dimanfaatkan untuk memicu perpecahan. Oleh karena itu, toleransi antarumat beragama harus diperkuat sebagai upaya menjaga persatuan bangsa. Pemerintah pun memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa kebijakan dan regulasi yang dibuat tetap selaras dengan nilai ketuhanan, termasuk melalui pendidikan agama dalam kurikulum nasional serta pembatasan penyebaran ideologi yang bertentangan dengan prinsip tersebut. Dengan menjadikan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai pedoman, Indonesia dapat menghadapi globalisasi tanpa kehilangan identitas spiritual dan moral masyarakatnya.

b. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

Globalisasi membawa perubahan besar dalam tatanan ekonomi dan sosial dunia, tetapi juga menimbulkan tantangan berupa ketimpangan sosial, eksploitasi tenaga kerja, dan kesenjangan ekonomi antara negara maju dan berkembang. Sistem ekonomi global yang berbasis persaingan bebas sering kali menempatkan negara berkembang pada posisi yang kurang menguntungkan, memperparah ketidakadilan sosial dan eksploitasi sumber daya. Dalam menghadapi hal ini, sila kedua Pancasila menegaskan pentingnya prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab untuk membangun masyarakat yang lebih berkeadilan. Prinsip ini menekankan perlakuan yang adil dan bermartabat bagi setiap individu, tanpa diskriminasi sosial, ekonomi, atau budaya. Selain itu, penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) menjadi aspek penting dalam menangkal dampak negatif globalisasi, seperti perdagangan manusia dan eksploitasi pekerja. Negara harus memastikan kebijakan ekonomi dan sosial yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan rakyat melalui regulasi ketat terhadap investasi asing, jaminan sosial, dan perlindungan hukum bagi kelompok rentan. Selain keadilan sosial, sila kedua juga menekankan pentingnya membangun masyarakat yang beradab dengan menjunjung rasa hormat, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama, baik dalam hubungan antarindividu maupun antarbangsa. Dengan penerapan nilai-nilai ini, Indonesia dapat menciptakan sistem sosial yang lebih inklusif, mengurangi kesenjangan ekonomi,

serta memastikan bahwa globalisasi membawa manfaat bagi seluruh rakyat, bukan hanya segelintir pihak.

c. Persatuan Indonesia

Era globalisasi membawa ancaman terhadap identitas nasional akibat arus informasi yang tidak terbandung, masuknya budaya asing, dan berkembangnya gaya hidup individualistik yang berpotensi mengikis nilai-nilai kearifan lokal serta melemahkan rasa nasionalisme. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat menyebabkan krisis identitas, terutama bagi generasi muda yang lebih mudah mengadopsi nilai-nilai asing. Dalam menghadapi tantangan ini, sila ketiga Pancasila menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagai prinsip fundamental dalam kehidupan sosial dan bernegara. Penguatan persatuan dapat dilakukan melalui pendidikan karakter berbasis Pancasila di sekolah dan perguruan tinggi untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan sejak dini. Selain itu, media massa dan teknologi informasi juga berperan dalam membentuk kesadaran kolektif terhadap persatuan, sehingga diperlukan upaya penyaringan informasi dan penguatan narasi kebangsaan melalui berbagai platform budaya. Pembangunan ekonomi yang inklusif turut menjadi faktor penting dalam menjaga persatuan, karena ketimpangan sosial-ekonomi dapat memicu perpecahan. Oleh karena itu, pemerataan pembangunan harus menjadi prioritas agar seluruh masyarakat merasa menjadi bagian dari satu kesatuan bangsa. Pemahaman sejarah perjuangan bangsa juga perlu diwariskan kepada generasi muda agar mereka tetap menghargai nilai-nilai kebangsaan dan tidak mudah terpengaruh oleh ideologi asing yang bertentangan dengan Pancasila. Dengan menjadikan sila ketiga sebagai pedoman, Indonesia dapat mempertahankan persatuan yang kokoh di tengah tantangan globalisasi, tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa yang berdaulat dan berbudaya.

d. Kerakyatan Yang Dipimpin Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

Globalisasi membawa perubahan signifikan dalam sistem politik dan pemerintahan, termasuk di Indonesia, dengan berkembangnya demokrasi liberal yang menekankan individualisme politik dan persaingan kekuasaan. Model demokrasi ini sering kali kurang selaras dengan karakter bangsa Indonesia yang mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, sila keempat Pancasila menjadi pedoman dalam membangun sistem demokrasi yang berakar pada nilai-nilai kearifan lokal, di mana demokrasi tidak hanya bersifat prosedural melalui pemilu, tetapi

juga substantif dengan mengedepankan musyawarah demi kepentingan bersama. Prinsip ini berperan dalam meredam konflik politik dan sosial yang dapat muncul akibat perbedaan kepentingan, terutama di tengah arus globalisasi yang memicu polarisasi dan fragmentasi sosial. Penerapan sila keempat juga menuntut partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, didukung oleh literasi politik yang baik agar tidak mudah terpengaruh oleh politik transaksional dan propaganda yang merusak integritas demokrasi. Selain itu, sistem perwakilan harus mencerminkan aspirasi rakyat secara adil, dengan memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan prinsip keadilan dalam pemerintahan. Dengan menjadikan sila keempat sebagai prinsip utama, Indonesia dapat menghadapi tantangan globalisasi tanpa kehilangan karakter demokrasi yang berbasis pada kebersamaan, musyawarah, dan kebijaksanaan kolektif.

e. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Globalisasi telah meningkatkan ketimpangan ekonomi akibat dominasi kapitalisme global, yang menguntungkan negara maju dan perusahaan multinasional, sementara negara berkembang seperti Indonesia menghadapi tantangan ketergantungan ekonomi, eksploitasi sumber daya alam, dan kesenjangan sosial-ekonomi. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat memperburuk ketidakadilan sosial dan melemahkan daya saing ekonomi domestik. Sila kelima Pancasila menegaskan pentingnya keadilan sosial sebagai tujuan utama dalam sistem ekonomi dan kebijakan pembangunan nasional, dengan distribusi kesejahteraan yang merata dan inklusif. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat sektor UMKM, melakukan reformasi agraria, serta memastikan akses ekonomi yang adil bagi seluruh masyarakat. Pembangunan ekonomi harus berorientasi pada keberlanjutan, dengan investasi dalam pendidikan dan kesehatan guna menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif. Selain itu, kebijakan fiskal progresif, seperti pajak yang adil dan subsidi yang tepat sasaran, diperlukan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Perlindungan tenaga kerja juga menjadi prioritas agar pekerja mendapatkan kesejahteraan yang layak di tengah persaingan global. Dengan menerapkan prinsip sila kelima Pancasila, Indonesia dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera serta memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi tantangan globalisasi.

2. Tantangan dalam Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Era Globalisasi

Meskipun nilai-nilai Pancasila tetap relevan, implementasinya di era globalisasi menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

a. Pengaruh Budaya Asing

Masuknya budaya asing akibat globalisasi membawa perubahan signifikan dalam pola pikir dan gaya hidup masyarakat Indonesia. Pertukaran budaya dapat memperkaya wawasan dan mendorong inovasi, namun jika tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti individualisme, hedonisme, dan sekularisme, dapat menjadi ancaman bagi karakter bangsa. Individualisme yang menekankan kepentingan pribadi berpotensi melemahkan solidaritas sosial dan gotong royong, yang merupakan nilai utama dalam sila ketiga Pancasila. Hedonisme yang berorientasi pada kesenangan dan kepuasan materi juga dapat mengikis semangat kerja keras serta kesederhanaan, sementara sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan publik dapat mengurangi kesadaran etika dan nilai kebangsaan. Oleh karena itu, strategi komprehensif diperlukan untuk menyeimbangkan keterbukaan terhadap budaya asing dengan pelestarian nilai-nilai Pancasila. Pendidikan karakter, peran keluarga, lembaga pendidikan, dan media harus diperkuat untuk membangun ketahanan budaya. Dengan sikap selektif dalam menerima budaya asing dan memperkuat nilai-nilai Pancasila, Indonesia dapat mempertahankan identitasnya sekaligus bersaing di kancah global tanpa kehilangan akar budayanya.

b. Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila

Salah satu tantangan utama dalam menjaga eksistensi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi adalah menurunnya pemahaman generasi muda terhadap makna dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan karakter berbasis Pancasila dalam kurikulum serta minimnya internalisasi nilai kebangsaan dalam kehidupan sosial. Paparan budaya global yang tidak selalu selaras dengan Pancasila, ditambah pola pikir pragmatis dan orientasi terhadap budaya populer, membuat generasi muda cenderung mengadopsi gaya hidup individualistik dan konsumtif. Lemahnya pembelajaran Pancasila di sekolah yang bersifat teoritis tanpa penerapan nyata, serta kurangnya keteladanan dari pemimpin dan tokoh masyarakat, semakin memperparah kondisi ini. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan revitalisasi pendidikan Pancasila dengan pendekatan aplikatif melalui diskusi, simulasi kasus, dan proyek sosial. Selain itu, sosialisasi nilai-nilai Pancasila melalui media sosial serta program kebangsaan berbasis komunitas juga harus diperkuat. Dengan upaya yang sistematis dan berkelanjutan, pemahaman serta pengamalan nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat meningkat, sehingga tetap menjadi ideologi yang relevan dalam menghadapi tantangan global.

c. Disintegrasi Sosial

Globalisasi membawa perubahan besar dalam pola pikir dan interaksi sosial masyarakat, tetapi juga dapat mempercepat disintegrasi sosial jika tidak diimbangi dengan upaya menjaga persatuan bangsa. Salah satu dampak negatifnya adalah meningkatnya konflik sosial akibat perbedaan pandangan politik, suku, agama, dan budaya, yang diperparah oleh penyebaran ujaran kebencian serta berita hoaks di media sosial. Polarisasi yang tajam, meningkatnya intoleransi, serta arus budaya asing yang mengikis nilai-nilai tradisional semakin melemahkan solidaritas sosial. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan penguatan nilai-nilai Pancasila, terutama sila Persatuan Indonesia, melalui pendidikan dan gerakan sosial yang menanamkan semangat kebangsaan. Selain itu, regulasi media sosial harus diperkuat untuk mencegah penyebaran konten yang memicu perpecahan, sementara masyarakat perlu lebih kritis dalam menyikapi informasi. Dengan kesadaran dan komitmen bersama, Indonesia dapat mempertahankan persatuan dan kebhinekaannya di tengah tantangan globalisasi.

d. Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan ekonomi menjadi tantangan besar bagi Indonesia di era globalisasi, di mana sistem ekonomi global yang menguntungkan negara maju memperlebar kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Dominasi perusahaan multinasional mengancam keberlanjutan UMKM lokal, mengurangi lapangan pekerjaan, serta memperburuk tingkat kemiskinan. Selain itu, perbedaan kesejahteraan antara perkotaan dan pedesaan mendorong urbanisasi yang menyebabkan pengangguran serta peningkatan pekerja informal dengan upah rendah. Untuk mengatasi hal ini, nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima tentang keadilan sosial, harus menjadi pedoman dalam menciptakan sistem ekonomi yang inklusif. Pemerintah perlu memperkuat sektor UMKM melalui akses permodalan, pelatihan, dan perlindungan hukum, serta mendorong pemerataan pembangunan dengan investasi infrastruktur di daerah terpencil. Reformasi pajak yang progresif, subsidi bagi kelompok rentan, serta peningkatan akses pendidikan dan pelatihan vokasional juga penting dalam mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat menghadapi tantangan globalisasi tanpa mengorbankan kesejahteraan rakyat dan tetap berpegang pada prinsip keadilan sosial.

e. Kurangnya Integrasi Nilai Pancasila dalam Kebijakan Publik

Kurangnya integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik menjadi salah satu faktor yang melemahkan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Banyak kebijakan yang masih bersifat pragmatis dan lebih berorientasi pada kepentingan

ekonomi atau politik jangka pendek, tanpa mempertimbangkan secara mendalam aspek keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan persatuan bangsa. Hal ini terlihat dalam berbagai sektor, seperti kebijakan ekonomi yang masih berpihak pada kapitalisme global tanpa perlindungan yang memadai bagi sektor usaha kecil dan menengah, kebijakan pendidikan yang belum sepenuhnya menanamkan nilai-nilai kebangsaan secara holistik, serta kebijakan sosial yang kurang efektif dalam mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi.

Selain itu, dalam sistem pemerintahan, masih ditemukan praktik birokrasi yang kurang transparan dan kebijakan yang kurang berpihak pada kepentingan rakyat secara luas. Banyak regulasi yang seharusnya mencerminkan semangat musyawarah dan gotong royong justru lebih condong pada pendekatan top-down tanpa melibatkan aktif masyarakat. Hal ini menyebabkan kebijakan yang dihasilkan kurang selaras dengan kebutuhan nyata rakyat dan tidak mencerminkan esensi demokrasi Pancasila yang menekankan permusyawaratan dan keadilan sosial.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan reformasi kebijakan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila secara konsisten dan menyeluruh. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi dan politik, tetapi juga nilai-nilai moral, keadilan sosial, dan persatuan nasional. Pelibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan juga harus diperkuat, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kepentingan rakyat banyak. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi ideologi dalam tataran konseptual, tetapi juga menjadi landasan nyata dalam pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

D. SIMPULAN

Relevansi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi terletak pada perannya sebagai landasan moral dan filosofis dalam menjaga identitas nasional, memperkuat persatuan, serta mewujudkan keadilan sosial di tengah perubahan global yang pesat. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten, Indonesia dapat beradaptasi dengan dinamika global tanpa kehilangan jati diri dan kedaulatan nasionalnya.

Tantangan dalam Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Era Globalisasi mencakup pengaruh budaya asing, menurunnya pemahaman generasi muda terhadap ideologi bangsa, serta meningkatnya ketimpangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis melalui pendidikan karakter, penguatan regulasi, dan kebijakan ekonomi yang

berkeadilan agar Pancasila tetap menjadi pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

E. SARAN

Untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi, diperlukan langkah konkret dalam memperkuat pemahaman dan implementasi Pancasila di berbagai aspek kehidupan. Pendidikan karakter berbasis Pancasila harus diperkuat sejak dini melalui kurikulum yang lebih aplikatif dan kontekstual. Selain itu, pemerintah, akademisi, dan masyarakat perlu berkolaborasi dalam menciptakan kebijakan yang mendukung penguatan nilai-nilai kebangsaan di tengah arus modernisasi dan digitalisasi.

Menghadapi tantangan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah harus mengoptimalkan regulasi yang melindungi kepentingan nasional tanpa menghambat keterbukaan terhadap dunia luar. Selain itu, penguatan media dan teknologi informasi berbasis nilai-nilai kebangsaan juga menjadi langkah penting dalam menangkal pengaruh negatif budaya asing serta menumbuhkan kesadaran generasi muda akan pentingnya menjaga identitas nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Alo Liliweri. *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2005.
- Annisa Ahadiani, Menur Putra Duwy, dan Siti Nurhayati Wergiri. "Dinamika Kebijakan Internasional: Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi." *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen* 1, no. 4 (2024).
- Muhamad Hisyam dan Cahyo Pamungkas, eds. *Indonesia, Globalisasi, dan Global Village*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Paulus Rudolf Yuniarto. "Masalah Globalisasi di Indonesia: Antara Kepentingan, Kebijakan, dan Tantangan." *Jurnal Kajian Wilayah* 5, no. 1 (2016).
- Yuni Arfina. "Tantangan Globalisasi Terhadap Keberagaman Budaya: Suatu Pendekatan Sosio-Politik." *Literacy Notes* 1, no. 2 (2023).